

# **BAB I**

## **PENDAUHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

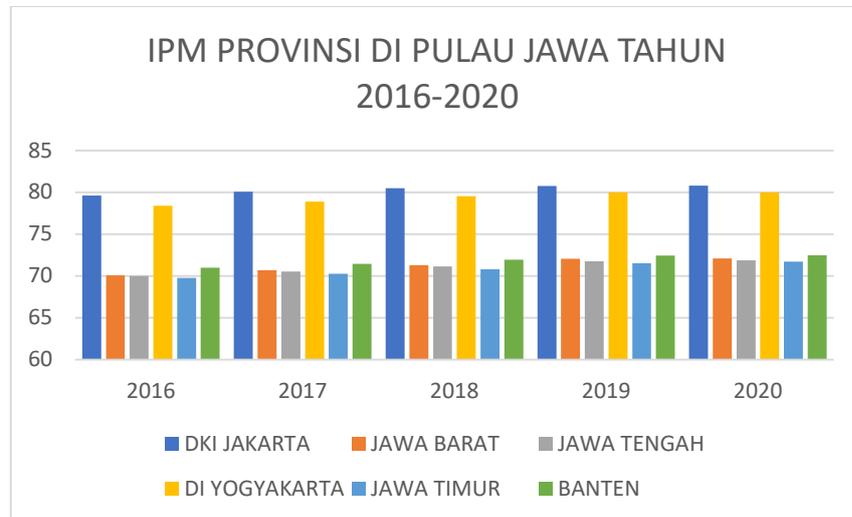
Dalam pembangunan dapat dilihat keberhasilannya apabila permasalahan dalam bidang ekonomi dapat teratasi, terutama permasalahan dalam ruang lingkup masyarakat. Karena pembangunan merupakan suatu langkah perubahan dari yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan menjadi ke arah yang lebih baik. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat meliputi kemiskinan dan pengangguran serta faktor-faktor lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan juga pembangunan yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas manusia. Menurut Maharany dalam jurnal (Sangkereng, Daisy S.M Engka, 2019) untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, manusia harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kapasitasnya dalam berbagai situasi yang menantang sehingga proses pembangunan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial dan sosial.

Salah satu cara suatu negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya adalah dengan menciptakan pembangunan yang salah satunya merupakan indikator pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith dalam jurnal (Prihastuti, 2018) sumber daya tenaga kerja merupakan investasi yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, karena pembangunan ini mengarah pada kemakmuran suatu negara, yaitu pentingnya skala ekonomi dan juga kualitas manusia.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia dapat dilihat dari kualitas hidup manusia itu dari berbagai negara, hal tersebut yang menyebabkan cara berpikir pembangunan yang sedang berkembang pada saat ini. Salah satu tolok ukur untuk melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga indikator yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak di daerah tersebut.

Menurut [bps.co.id](http://bps.co.id) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 lalu dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM sendiri menjadi indikator penting untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dimana dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan jika suatu daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati angka 100 maka pembangunan manusia di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati 0 (nol) maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk.

**Gambar 1.1 IPM Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Persen)**



Sumber : BPS 2022 (data diolah)

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Provinsi di Pulau Jawa di tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi namun cenderung stagnan. Jika dilihat dari 5 tahun terakhir, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan nilai IPM tertinggi di Pulau Jawa. Diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan urutan nomor 2 tertinggi dan Provinsi Banten dengan urutan nomor 3, lalu diikuti oleh 3 provinsi lainnya yang berubah-berubah tempat. Pada tahun 2016, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai IPM 79,6% dengan perbedaan yang tipis dengan Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai IPM 78,38%. Sedangkan untuk Provinsi Banten dengan nilai 70,96%. Pada tahun 2017 nilai IPM tertinggi masih dipegang oleh DKI Jakarta dengan nilai 80,06%, posisi kedua dipegang oleh DI Yogyakarta dengan 78,89%, dan posisi ketiga dipegang oleh Banten dengan 71,42%. Pada tahun 2018 nilai IPM tertinggi masih dipegang oleh DKI Jakarta dengan nilai 80,47% dan posisi kedua juga masih dipegang oleh

DI Yogyakarta dengan nilai 79,53% begitupun dengan posisi ketiga masih dipegang oleh Banten dengan 71,95%. Pada tahun 2019 DKI Jakarta di posisi pertama dengan 80,76%, DI Yogyakarta dengan nilai IPM 79,99%, dan diikuti oleh Banten dengan nilai IPM 72,44%. Hingga pada tahun 2020 DKI Jakarta masih memimpin dengan nilai IPM 80,77% diikuti oleh DI Yogyakarta dengan nilai IPM 79,97% dan posisi ketiga diikuti oleh Banten dengan 72,45%. Tahun 2020 nilai IPM Provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan kecuali Provinsi DI Yogyakarta yang mengalami penurunan. Meskipun nilai IPM Provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan yang terjadi sangatlah rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana DKI Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar 0,42% dan Banten sebesar 0,01%. Hal tersebut terjadi karena adanya *pandemic Covid-19* yang terjadi di sepanjang tahun 2020 yang menyebar luas di seluruh dunia termasuk Indonesia hingga Pulau Jawa.

Nilai IPM di seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama Provinsi Banten yang terdekat dengan pusat ekonomi Indonesia yaitu DKI Jakarta. Provinsi Banten juga dikenal dengan sebutan “Provinsi Penyangga Ibu Kota” karena banyaknya pekerja yang bekerja di DKI Jakarta namun bertempat tinggal di Provinsi Banten agar biaya hidupnya lebih rendah. IPM Provinsi Banten berada pada peringkat ketiga di Pulau Jawa. Wilayah Banten dapat dibilang strategis karena dekat dengan DKI Jakarta yang sebagai ibukota dan pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan. Banten juga berada pada posisi strategis karena berada dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera.

Badan Pusat Statistik mengubah beberapa indikator IPM yang telah tidak relevan lagi dengan perhitungan IPM terbaru. Dimana Angka Melek Huruf diganti dengan Angka Harapan Lama sekolah, lalu Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sehingga pengangguran diduga sebagai indikator perubahan dalam menaikkan IPM (Ningrum et al., 2020).

Peran pemerintah sangatlah penting untuk meminimalisir angka pengangguran pada tiap tahunnya. Terlebih pada negara berkembang yang tingkat pengangguran tinggi masih sering ditemui. Dimana Indonesia merupakan termasuk dalam negara berkembang (Karisma & Soejoto, 2010).

**Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Persen)**



sumber : BPS 2022 (data diolah)

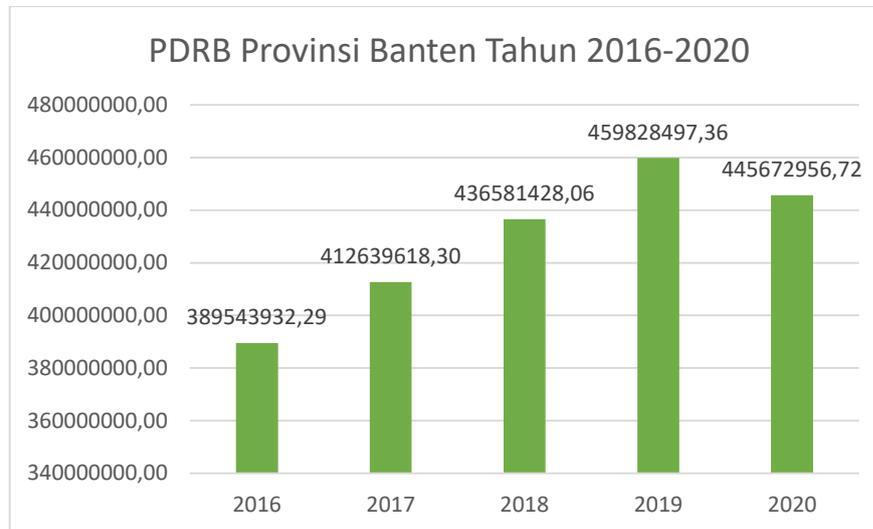
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Banten mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran di Provinsi Banten 8,92%

naik sebesar 0,36% pada tahun 2017 menjadi 9,28%. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018-2019 yaitu pada tahun 2018 turun sebesar 0,81% menjadi 8,47% dan pada tahun 2019 turun sebesar 0,36% menjadi 8,11%. Namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran naik tinggi hingga 2,53% menjadi 10,64%.

Kenaikan tertinggi Tingkat Pengangguran Terbuka terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,53% dengan data Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 10,64%. Hal tersebut dikarenakan adanya *pandemic covid-19* yang melanda Provinsi banten sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakatnya. Dimana banyak pengangguran-pengangguran baru yang muncul karena kehilangan pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar sehingga terpaksa memutus hubungan kerja dengan karyawannya. Hal itulah yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 meningkat drastis.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam SIRUSA (Sistem Informasi Rujukan Statistik) pengangguran tgerbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dalam hal ini baik yang belum pernah bekerja sama sekali atau yang sudah pernah bekerja, juga orang yang sedang mempersiapkan usaha, dan orang yang tidak mencari pekerjaan karena dirinya merasaa tidak memungkinkan untuk dapat pekerjaan, serta orang yang telah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Gambar 1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten  
Tahun 2016-2020 (Persen)**



sumber : BPS 2022 (data diolah)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, nilai PDRB Provinsi Banten selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang stabil pada tahun 2016-2019, lalu mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada data diatas, dimana pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 23.095.686 juta rupiah dari 389.543.932 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 412.639.618 juta rupiah pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 23.941.809 juta rupiah menjadi 436.581.428 juta rupiah. Pada tahun 2019 juga tetap mengalami kenaikan PDRB sebesar 23.247.069 juta rupiah menjadi 459.828.497 juta rupiah. Sayangnya pada tahun 2020 nilai PDRB menurun sebesar -14,155.540 juta rupiah menjadi 445.672.956 juta rupiah. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu daerah pada suatu periode tertentu.

Kenaikan PDRB Provinsi Banten tidak lepas dari peran Pemerintah Provinsi Banten yang melakukan efisiensi dan efektifitas kebijakan dalam

pengurangan pengangguran yaitu dengan mempercepat pembangunan ekonomi dengan melakukan prioritas sector atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi untuk berkembang seperti kelautan, perikanan, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Pada tahun 2020 PDRB Provinsi Banten mengalami penurunan karena adanya *pandemic covid-19* yang melanda Provinsi Banten. Dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja serta pengurangan pendapatan maka daya beli masyarakat pun menjadi lemah. Sehingga hal tersebut membuat produksi barang maupun jasa juga berkurang. Alhasil PDRB Provinsi Banten pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Dengan menurunnya tingkat pengangguran yang disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi laju IPM. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan menstimulasi sector-sector ekonomi seperti sektor industri, perdagangan, jasa dan masih banyak sector-sector lainnya untuk berkembang. Dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut maka sumber daya manusia di daerah tersebut juga akan semakin baik.

Dari fenomena diatas dapat diketahui bahwa kelompok yang mudah terjatuh kebawah garis kemiskinan adalah masyarakat kelompok kurang mampu yang tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dari itu untuk bisa tetap menjaga daya beli masyarakat kurang mampu tersebut dibutuhkan peran dari pemerintah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dan memadai diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan. Jika tingkat kemiskinan rendah maka pertumbuhan ekonomi meningkat, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka dapat menghasilkan lebih

banyak lapangan pekerjaan. Begitupun sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun maka akan banyak tenaga kerja yang tidak dapat terserap oleh pasar sehingga menimbulkan adanya pengangguran. Menurut (Ningrum et al., 2020) hal tersebut dapat terjadi karena kemiskinan dapat menghambat seseorang untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak. Dimana dapat menyebabkan tidak adanya peningkatan sumber daya manusia hingga akhirnya menyebabkan pengangguran meningkat.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Chalid & Yusuf, 2014) dari hasil analisis diketahui bahwa tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan - 0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953. Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syofya, 2018) Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan dalam ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  atau  $4,008 > 2,570$  dengan besarnya pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia adalah 2,007%, dan Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  atau  $3,363 >$

2,570 dengan besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia adalah 2,313%.

Berdasarkan penelitian (Dewi, Kurnia Sari et al, 2021) Dapat disimpulkan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM Kabupaten Bojonegoro diketahui berdasarkan thitung kurang dari ttabel ( $0,861 \leq 1,761$ ) selain itu dilihat dari tingkat signifikasinya yaitu 0,404. Pengangguran belum mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro dengan nilai t hitung kurang dari t tabel ( $1,137 \leq 1,761$ ) selain itu apabila dilihat dari signifikasinya yaitu 0,275. sedangkan kemiskinan dapat secara signifikan mempengaruhi IPM di Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari nilai thitung lebih dari ttabel ( $3,404 \geq 1,761$ ) selain itu dilihat dari tingkat signifikasinya yaitu 0,004.

Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memilih lokasi di Provinsi Banten dikarenakan Banten termasuk di dalam 10 Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi nomor 8 tahun 2020 (Sumber: BPS Maret 2022), namun tidak sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka di Banten yang tinggi. Dimana tingginya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten yang mencapai 10,64% atau di atas rata-rata nasional 7,07%. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 445.672.956 milyar rupiah tahun 2020 yang menurun sebesar 14.155.540 milyar rupiah. Maka Peneliti tertarik mengambil judul tentang **“Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah PDRB berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia, ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel terikat indeks pembangunan manusia dan variabel bebas yaitu tingkat pengangguran terbuka dan PDRB Provinsi Banten 10 tahun (2011-2020).

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan

Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Banten dalam menentukan arah kebijakan dengan memahami keadaan di sekitar dan mengetahui sumber daya manusia melalui kajian-kajian pembangunan manusia di masa yang akan datang.
3. Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi bagi penelitian berikutnya